



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

# Tunggakan PBB-P2 Nyaris Rp1 Miliar

**KEPAHIANG** - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang mendata, angka tunggakan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Tahun Anggaran (TA) 2023 nyaris menembus angka Rp1 miliar.

Hingga melewati semestes pertama TA 2024, tunggakan PBB P2 dengan angka persisnya mencapai Rp840 juta itu, tak kunjung terselesaikan.

Padahal, PBB-P2 tersebut sifatnya wajib dan mesti diselesaikan semua objek pajak yang terdata di Kabupaten Kepahiang.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kepahiang Amarullah Mutaqin, SE, MAP tak menampikinya.

Mengenai besarnya angka tunggakan PBB-P2 tersebut, pihaknya juga mengaku tak mengetahui penyebabnya.

Lantaran versinya BKD, setiap tahun proses penagihan langsung oleh petugas rutin dilakukan.

Guna menekan angka tunggakan tersebut, tahun ini penagihan yang dilakukan pihaknya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali terhadap objek PBB-P2.

"Jika tidak juga dibayar, maka akan dilakukan kerja sama penagihan dengan Kejari Kepahiang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK)," ujar Amar.

Berikut target dan realisasi PBB-P2 per kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Di Kecamatan Kepahiang dari target Rp685 juta, baru terealisasi Rp384 juta.

Lalu, Kabawetan Rp197 juta dengan realisasiasi Rp177 juta.

Kecamatan Tebat Karai, dari target Rp177 juta realisasi Rp127 juta.

Kecamatan Seberang Musi, target Rp121 juta dengan realisasi Rp67 juta.

Kecamatan Bermani Ilir dengan target Rp228 juta, realisasi Rp104 juta.

Kecamatan Muara Kemumu target Rp 130 juta, realisasi Rp 53 juta.

Kecamatan Ujan Mas target Rp289 juta, dengan realisasi Rp150 juta.

Serta, Kecamatan Merigi target Rp161 juta dengan realisasi baru mencapai Rp78 juta.

Sebagai gambaran, di TA 2024 PAD dipatok Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 52,5 miliar meningkat ketimbang PAD 2023 sebesar Rp41,9 miliar.

Salah satu objek pajak yang bisa meningkatkan capaian PAD adalah, Pajak Bumi Bangunan, Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Tak hanya sektor PBB-P2, sektor lain yang berpotensi besar mendulang PAD adalah, penarikan pajak rumah makan yang saat ini telah menggunakan aplikasi.

Sektor pendapatan yang menjadi pendongkrak capaian PAD lainnya, adalah pajak daerah.

Pada 2023, sektor pajak daerah terkumpul hingga Rp8,3 miliar dari target Rp7,4 miliar yang ditetapkan.

Lalu, penyumbang PAD Kabupaten Kepahiang lainnya berupa retribusi yang ditargetkan Rp700 juta, terealisasi Rp300 juta.

Kemudian, pengelolaan kekayaan daerah dari target Rp2,1 miliar sudah tercapai seluruhnya.

Lain-lain PAD yang sah, targetnya Rp30 miliar realisasi Rp26 miliar. (oce)